

Diterima: [September 04, 2025]

Direvisi: [Januari 13, 2026]

Diterbitkan: [Juli 29, 2026]

Article type: [Research Article] | Subject area: [Political Thought & Ideology] | Running title: [Syahrir's Socialism & Anti-Capitalism]

ANALISIS RELEVANSI PEMIKIRAN SOSIALISME SUTAN SYAHRIR TERHADAP PERJUANGAN ANTI KAPITALISME DI INDONESIA

Kayla Azalia Putri Rosano¹, Sury Riahma Rodearni², Agustina Fita³, Daniel Gilbert⁴,
Syarifah Noor Aliya⁵, Deni Angela⁶

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

³Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

⁴Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

⁵Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

⁶Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*Corresponding author: 2310413056@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research examines the relevance of Sutan Syahrir's socialist thinking in the context of the anti-capitalist struggle in Indonesia, especially on the operational impact of PT. Freeport Indonesia in Papua. The findings underscore the detrimental effects of PT. Freeport's capitalist operations on local communities and the environment in Papua. The company's practices have resulted in substantial economic losses, environmental degradation, and social disruptions among indigenous populations. While the Indonesian government has attempted to exert control over PT. Freeport through increased ownership stakes, challenges persist in ensuring equitable wealth distribution and mitigating environmental impacts effectively. The ideology of socialism is seen as an important tool for achieving equality and welfare of society, which is in sharp contrast to the exploitative capitalist practices carried out by PT. Freeport. This research uses a qualitative method with a case study and document approach to collect data. The research results show that capitalism is represented by PT. Freeport has caused huge losses to local communities and the environment in Papua. The Indonesian government has taken steps to control PT. Freeport by increasing share ownership, but the challenges of distributing wealth fairly and reducing environmental impacts still need to be overcome. This study concludes by advocating for Sutan Syahrir's socialist principles as a foundation for constructing a more equitable and sustainable economic framework in Indonesia. This research concludes that Sutan Syahrir's socialist thinking can be a strong foundation for building a more just and sustainable economic system in Indonesia..

Keywords: Socialism, Anti-Capitalism, Freeport.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji relevansi pemikiran sosialisme Sutan Syahrir dalam konteks perjuangan anti-kapitalisme di Indonesia, khususnya terhadap dampak operasional PT. Freeport Indonesia di Papua. Temuan ini menggarisbawahi dampak buruk dari PT. Operasi kapitalis Freeport terhadap masyarakat lokal dan lingkungan hidup di Papua. Praktik perusahaan telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, degradasi lingkungan, dan gangguan sosial di kalangan penduduk asli. Sementara pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melakukan kontrol atas PT. Freeport melalui peningkatan kepemilikan, tantangan tetap ada dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan memitigasi dampak lingkungan secara efektif. Ideologi sosialisme dipandang sebagai alat penting untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat, yang sangat kontras dengan praktik kapitalisme eksploitatif yang dijalankan oleh PT. Freeport. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme yang diwakili oleh PT. Freeport telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat lokal dan lingkungan di Papua. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan PT. Freeport dengan

meningkatkan kepemilikan saham, namun tantangan dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan mengurangi dampak lingkungan masih perlu diatasi. Kajian ini diakhiri dengan mengadvokasi prinsip-prinsip sosialis Sutan Syahrir sebagai landasan untuk membangun kerangka ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran sosialisme Sutan Syahrir dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Sosialisme, Anti-Kapitalisme, Freeport.

DOI: <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v9i1.16200>

Lisensi: CC BY-SA 4.0

RESEARCH HIGHLIGHTS

[Applies Sutan Syahrir's democratic socialism to modern anti-capitalism.]

I. PENDAHULUAN

Ideologi dapat dijadikan sebagai landasan dasar untuk membangun sebuah struktur dalam setiap negara, yang mana ideologi sebagai acuan dan batasan bagi negara dalam menentukan apakah sebuah kebijakan yang dibuat sudah selaras dengan prinsip yang dipegang oleh negara tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan gagasan yang didalamnya mengadopsi berbagai ide dan pola pikir yang terus berkembang di masyarakat. Ideologi dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan berbagai kelompok dan kalangan tanpa memandang strata sosial. Menurut Karl Marx ideologi merupakan alat yang berfungsi dalam mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Sementara, menurut Machiavelli, ideologi merupakan sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam sistem pemerintahan, dapat dikatakan ideologi sebagai tameng dan juga alat pengatur yang digunakan oleh pemerintah sehingga kekuasaan yang dijalankan dapat sesuai dengan ideologi negara yang dijalankan.

Berbagai ideologi hadir sebagai sebuah doktrin sosial yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pandangan mereka, sehingga masyarakat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana cara mereka berpikir melalui ideologi yang mereka percaya. Salah satunya adalah ideologi sosialisme, ideologi ini berpandangan bahwa setiap individu membutuhkan individu lainnya. Dengan kata lain, pemikiran ini merujuk pada kesetaraan sosial melalui peran dari pemerintah dan masyarakat. Keberadaan ideologi sosialis ini dapat ditandai dengan mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan rakyat menjadi yang paling utama bagi negara. Selain itu, kaum sosialis pun memegang teguh prinsip pemerataan dan kesetaraan di masyarakat sehingga segala bentuk diskriminasi di ruang lingkup sosial tidak diizinkan terjadi. Lalu, segala bentuk kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi diatur oleh negara, dengan demikian segala sarana dan prasarana yang digunakan hanya dimiliki oleh negara. Menurut Alexander Vinet, paham sosialisme bertujuan dalam membentuk negara yang memberlakukan usaha kolektif dan membatasi kepemilikan secara perorangan, sedangkan menurut Karl Marx dan Friedrich Engels paham sosialisme tersebut dapat menjadi jalan untuk menjadi masyarakat yang lebih sempurna dengan adanya pengembangan diri.

Awal dari perkembangan paham sosialisme ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Adanya kritik terhadap kapitalisme, hal ini terlihat jelas bahwa paham sosialisme ini menilai kapitalisme hanya menguntungkan kaum borjuis atau pemilik modal. Sistem yang digunakan kapitalisme ini dinilai oleh kaum sosialisme merugikan dan mengeksploitasi kaum proletar atau kaum buruh, sehingga adanya kesenjangan dalam akses ke sumber daya yang ada. Kemudian, adanya komunitas yang egaliter, egaliter sendiri merupakan paham yang menekankan pada kesetaraan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisme menciptakan masyarakat yang egaliter, dimana tidak ada kesenjangan sosial dan perbedaan kelas maupun status sosial yang terjadi secara signifikan yang diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan sosial dan meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Lalu, adanya pengembangan sosial yang mendorong dalam mengurangi tingkat eksploitasi yang terjadi. Paham sosialisme ini berfokus dalam membangun masyarakat yang adil dan terbebas dari segala bentuk eksploitasi. Hal ini

dinilai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik kedepannya. Selanjutnya, adanya reformasi dan revolusi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dua cara tersebut yang dapat mengubah struktur sosial dan politik yang ada, seperti dengan menerapkan kebijakan yang lebih adil dan egaliter. Namun, jika reformasi yang digunakan ini tidak dapat dicapai secara baik, sosialisme dapat menggunakan revolusi kekerasan untuk mencapai tujuan mereka yaitu kesetaraan. Hal ini dilakukan dengan menghancurkan struktur sosial dan politik yang ada dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih adil dan egaliter. Oleh ciri tersebut perkembangan paham sosialisme ini terus berkembang di dunia dan di Indonesia khususnya.

Kehadiran pemikiran sosialisme di Indonesia bermula dari organisasi bernama *Indische Social Democratische Vereeniging* atau ISDV, yang didirikan pada tahun 1914 di Semarang oleh seorang sosialis Belanda termasuk Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Masuknya kaum-kaum sosialis dari Belanda dan bumiputera terdidik ke dalam organisasi ISDV, yang menjadi tempat bagi para intelektual dan aktivis untuk melakukan penyebaran terkait ide-ide sosialisme, memperjuangkan nasib para pekerja, serta melakukan penentangan terhadap penindasan yang dilakukan oleh kolonial. ISDV telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan sosial di Indonesia. Pada waktu itu, Indonesia berada dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan. Namun, gerakan ISDV telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan sosial dan politik, serta memberikan inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di masa mendatang.

Sutan Syahrir merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, dikenal luas sebagai negarawan, diplomat, dan pemikir sosialisme yang berpengaruh. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Syahrir tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan dan pemikiran yang progresif. Sutan Syahrir memulai pendidikan di *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) dan kemudian melanjutkan ke *Algemene Middelbare School* (AMS) di Bandung, tempat dirinya mulai mengenal ide-ide sosialisme dan pergerakan sosial. Syahrir memilih sosialisme sebagai paham politiknya, didorong oleh semangat kebebasan dan kemandirian manusia yang kuat.

Sutan Syahrir dikenal sebagai seorang yang sangat humanis dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Keadaan Indonesia pada saat itu menggugah keinginan Sutan Syahrir untuk memperbaiki situasi yang dianggap sangat berbanding terbalik dengan keyakinannya sebagai seorang yang humanis. Syahrir sangat konsisten dalam pemikirannya yang anti-fasisme dan komunisme. Dalam pandangan Sutan Syahrir, fasisme dan komunisme sangat menindas nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini jelas terwujud dalam pemikiran dan tindakannya selama pengisian kemerdekaan Indonesia. Sutan Syahrir tidak bersedia bekerjasama dengan Jepang dan sangat menentang orang-orang Indonesia bekerjasama dengan Jepang, karena menurutnya hal ini berarti menurunkan derajat bangsa Indonesia.

Pemikiran Syahrir berpegang pada satu fokus utama yaitu untuk mencapai cita-cita tentang kebebasan dan kemandirian individu yang akhirnya mendorong Sutan Syahrir untuk memilih sosialisme sebagai paham ideologinya. Pemikiran ini tentu saja bertolak belakang dengan ideologi komunisme yang pada saat itu Syahrir melihat sendiri bagaimana komunisme yang dibangun di Rusia, oleh pemerintahan Stalin yang mengarah pada negara yang totaliter. Dengan melihat komunisme yang dibangun di Rusia dan diterapkan secara bengis oleh Stalin, Syahrir memandang bahwa komunisme telah berubah menjadi tindak kejahatan bukan lagi sebagai tindakan revolusioner sosialis yang menunjukkan hilangnya hati nurani dan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya seperti pandangan kebanyakan orang komunis.

Para pengamat menggolongkan ideologi Sutan Syahrir sebagai sosial-demokrat, cabang Marxisme yang menginginkan pencapaian masyarakat dari bentuk kapital menuju sosialisme. Syahrir belajar tentang sosialisme dari karya Hilferding, Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, Otto Bauer, Hendrik de Man, dan tentu saja Marx dan Engels. Ia pernah bekerja untuk serikat buruh, yaitu Sekretariat Federasi Pekerja Transportasi Internasional.

Syahrir dan kaum sosialis lainnya juga memiliki pandangan kritis yang ditujukan kepada sistem kapitalisme. Kritik Syahrir terhadap kapitalisme ditulis dalam karya tulisan politiknya. Menurut Syahrir, kapitalisme telah menyebabkan munculnya tekanan sosial dan eksploitasi yang ekstrim terhadap penduduk asli Indonesia. Syahrir mengatakan bahwa aspek khusus dari paham kapitalisme ini, karena adanya polarisasi opini masyarakat. Hanya beberapa orang yang dapat memberikan pengaruh di masyarakat, dengan latar belakang keuangan yang diatas rata-rata dan akses terhadap alat-alat produksi. Sementara, mayoritas penduduk tetap hidup dalam kondisi kemiskinan. Menurut Syahrir, proses akumulasi kapital oleh kelompok pemodal kecil ini mengakibatkan eksploitasi kesempatan kerja secara sistematis. Selain itu, Syahrir mengkritik kecenderungan kapitalisme yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek dan mengabaikan kebutuhan masyarakat umum. Menurut pandangan Syahrir, sistem ini telah menyebabkan munculnya praktik-praktik monopoli, terspesialisasi, dan tidak dapat dihancurkan yang merusak nilai-nilai universal.

Selain itu gagasan lainnya terkait pandangan sosialisme Sutan Syahrir ini memiliki beberapa sumber yaitu mengenai sosialisme kerakyatan, gagasan Sutan Syahrir ini memfokuskan kepada hak-hak kepada rakyat dan bentuk keadilan kemanusiaan lainnya. Selain itu, adanya gagasan mengenai penghapusan diskriminasi. Dimana dirinya menentang adanya kesenjangan pada kaum laki-laki dan perempuan dengan tujuan menciptakan kesetaraan di masyarakat. Kemudian adanya pengaruh dari paham Marxisme ini, ia berpandangan bahwa golongan revolusioner tidak berhak mengatur dan memerintah kaum ataupun golongan lainnya di masyarakat. Pengaruh lainnya ada dari aspek politik, dimana ia menekankan pentingnya demokrasi dan menolak sistem pemerintah yang totaliter sehingga paham beliau berfokus pada hak-hak rakyat saja. Oleh karena itu sumber atau landasan pemikiran sosialisme Sutan Syahrir dikarenakan faktor latar belakang juga, dimana akibat masa kolonialisme dan kapitalisme yang terjadi di Indonesia ini membuat beliau untuk berfokus pada hak-hak warga sipil dengan meningkatkan sistem demokrasi yang lebih baik untuk menghadapi segala tantangan sosial politik maupun ekonomi kedepannya. Berdasarkan sumber dari gagasan Sutan Syahrir ini semuanya saling berkaitan, dimana menunjukkan Sutan Syahrir menolak segala bentuk praktik kapitalisme dan kekuasaan yang totaliter di Indonesia.

Menurut Syahrir, kapitalisme yang berkembang di Indonesia pada masa itu juga memiliki kecenderungan feodalistik dan merugikan. Sistem ini, sejauh yang ia pahami, hanya menguntungkan orang kaya dan tidak memberikan kesejahteraan bagi orang miskin. Dalam konteks Indonesia, Syahrir menegaskan bahwa ekonomi nasional harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu industri berbasis rakyat dan koperasi. Hal ini terbukti dari pengamatannya bahwa sektor-sektor ini dapat menjadi batu loncatan untuk pembangunan ekonomi yang berfokus pada kebutuhan rakyat dan bukan hanya pada kepentingan kapitalis. Selain itu, Syahrir menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan nasional yang berkaitan dengan sektor-sektor industri strategis. Oleh karena itu, perbatasan negara perlu dilindungi agar pembangunan ekonomi dapat diarahkan pada kepentingan seluruh masyarakat dan bukan hanya untuk memuaskan ambisi kapitalis. Syahrir juga berpendapat bahwa pembangunan ekonomi harus diintegrasikan dengan pembangunan sosial dan politik. Dia menekankan perlunya demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan agar rakyat tidak hanya menjadi objek pembangunan. Sebagai penyeimbang sistem kapitalisme, Syahrir menawarkan pandangan sosialisme yang lebih moderat dan demokratis. Dari analisisnya, perlu adanya redistribusi sumber daya produksi dan kekayaan kepada masyarakat luas agar dampak kesejahteraan dapat dirasakan secara adil. Syahrir menekankan pentingnya memajukan demokrasi ekonomi, yang didasarkan pada bisnis yang dikelola oleh warga negara dan koperasi. Menurutnya, model ekonomi seperti ini akan lebih efektif dalam mengangkat masyarakat dan mendorong kemajuan sosial.

Dalam pandangan Sutan Syahrir, ia sangat menentang segala bentuk praktik kapitalisme yang terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan politik. Praktik kapitalisme sendiri

merupakan suatu bentuk tindakan dimana perputaran kekuasaan hanya ditujukan kepada salah satu individu maupun perusahaan swasta. Dalam sistem kapitalis ini seringkali kekuasaan terpusat kepada pemilik modal dimana kepentingan ekonomi para elit lebih diutamakan dalam sistem ini. Dengan terjadinya ekonomi terpusat ini, pemilik modal mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun upah yang didapatkan pekerja tetap sama yaitu relatif rendah. Hal ini tentu menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang sangat signifikan antara pemilik modal dan para pekerja dan karena hal ini juga timbulnya eksploitasi kepada para pekerja.

Pemikiran sosialisme Sutan Syahrir terkait anti-kapitalisme yang dipengaruhi oleh beberapa pemikiran lainnya yang mendukung pemahamannya, seperti Marxisme, Nasionalisme, Islam. Dirinya terinspirasi oleh gagasan milik Karl Marx, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan pemerataan dalam masyarakat, serta menentang kapitalisme yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Selain itu, Sutan Syahrir juga memberikan pengaruh perkembangan atas paham nasionalisme di Indonesia, yang menyoroti pentingnya kemerdekaan dan kesetaraan untuk masyarakat Indonesia.

Syahrir juga pernah berbicara tentang nasionalisme di Konferensi Sosialis Asia pada tahun 1953. Sutan Syahrir berpendapat bahwa nasionalisme harus didasarkan pada demokrasi karena jika bergabung dengan feodalisme lokal, nasionalisme dapat berubah menjadi fasisme. Jika tidak dilandasi oleh pemikiran humanistik atau kemanusiaan—nasionalisme dapat menjadi chauvinistik dalam hubungan internasional. Ini adalah apa yang dialami Hitler dan Mussolini, yang menyebabkan Perang Dunia kedua. Menurutnya, sosialisme yang dia maksud adalah sosialisme berdasarkan kerakyatan yang mengakui bahwa setiap orang memiliki kemerdekaan untuk berpikir dan bertindak sesuai keyakinannya. Sosialisme kerakyatan, yang mengakui kebebasan setiap orang untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan keyakinannya, adalah jenis sosialisme yang Syahrir yakini cocok untuk Indonesia. Syahrir menekankan bahwa tujuan sosialis dan komunis berbeda. Ia menolak pengucilan, yang berarti pembatasan ilmu pengetahuan dan pemikiran, chauvinisme, dan kediktatoran, seperti yang terjadi di Cina dan Uni Soviet.

Syahrir menyatakan bahwa ideologi Sosialis dan Komunis memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa Sosialisme berarti menghormati martabat manusia. Secara eksplisit dirinya menekankan bahwa tujuan dan strategi kaum sosialis berbeda dengan kaum komunis. Bagi kaum sosialis, diktator proletar merupakan jenis kediktatoran yang melanggar demokrasi, meskipun dianggap sebagai tahapan revolusi oleh kaum komunis. Memang, Syahrir dan kaum sosial demokrat lainnya secara teoritis merevisi teori Marxis tentang Diktator Proletariat, meskipun itu dianggap sebagai langkah menuju sosialisme. Meskipun para pengamat menggolongkan Syahrir sebagai sosial-demokrat, Sutan Syahrir menamakan apa yang diperjuangkannya sebagai Sosialisme Kerakyatan. Sosialisme yang selalu menjunjung tinggi persamaan dan menempatkan solidaritas kemanusiaan diatas segalanya.

Paham politik sosialisme Sutan Syahrir lah yang mendorongnya untuk membentuk Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Sutan Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena ia percaya pada jalan demokrasi dan menentang totalitarianisme Partai ini dianggap sebagai partai elit karena anggotanya berasal dari kalangan pendidikan tinggi di kota daripada populasi daerah. Karena itu, partai ini berfokus pada pengkaderan politik, sehingga memiliki pengaruh yang berbeda dari partai berbasis massa seperti PKI atau Masyumi. Visi dan misi PSI sangat menekankan perjuangan partai untuk demokrasi. Anggaran dasar PSI menunjukkan tujuan untuk membangun masyarakat sosialis yang berakar pada kerakyatan, yaitu mengakhiri penindasan. Anggaran dasar PSI menunjukkan tujuan untuk membangun masyarakat sosialis yang berakar pada kerakyatan, yang menjamin persatuan, kemakmuran, dan kemajuan Indonesia.

PSI sendiri mengembangkan ideologi sosialisme, yang merupakan langkah pertama menuju komunisme. PSI menggunakan pendekatan konstitusional, mirip dengan perjuangan partai-partai sosialis demokrat di Eropa. Mereka tidak melakukan pendekatan kekerasan, namun tetap menganut demokrasi dan membela hak-hak dasar, tunduk pada konstitusi, dan melakukan

pemilihan umum yang demokratis. Menjamin hak asasi manusia, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, adalah prioritas utama dalam program-program yang disediakan oleh PSI. Partai sosialis demokrat ini juga mendorong negara untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Kemakmuran dapat dicapai melalui upaya pemerintah, perusahaan, dan kelompok-kelompok masyarakat.

Dari gerakan, ide, dan tujuan PSI di Indonesia, terlihat bahwa partai ini memiliki kesamaan pandangan dengan partai-partai sosialis demokrat lainnya di Eropa. Hal ini ditunjukkan oleh program-program yang diusung PSI dan cara mereka menolak dampak komunisme di Indonesia. PSI adalah sosialis demokrat yang bertujuan untuk membangun masyarakat sosialis yang tetap berlandaskan demokrasi. Dalam prosesnya, PSI berjuang melalui persuasi dan kemajuan, bukan dengan kekerasan yang bahkan PSI ikut serta dalam pemilihan umum tahun 1955.

Seperti yang telah dijelaskan bagaimana perkembangan pandangan sosialisme di Indonesia membentuk suatu cara pandang baru yang dipengaruhi oleh Sutan Sjahrir, hal ini juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Dinamika sosial, ekonomi, dan politik juga sangat dipengaruhi oleh pandangan anti-kapitalisme di Indonesia. Berbagai pengaruh dari era pra-kemerdekaan sampai orde baru akhir yang menjadi momentum terakhir gerakan anti-kapitalisme di Indonesia. Di era Orde Baru khususnya yang menjadi momentum terakhir gerakan anti kapitalisme, Tercatat bahwa beberapa gerakan mahasiswa dari tahun 1971 hingga 1998 menjadi katalisator gerakan anti kapitalisme. Gerakan golongan putih dimulai pada tahun 1971 oleh Arif Budiman dan rekan-rekannya. Pada tahun 1974, Hariman Siregar mengorganisir demonstrasi di Universitas Indonesia (UI) untuk menentang investasi Jepang. Sampai tahun 1978, protes mahasiswa terus berlangsung. Terbukti bahwa kelompok penentang anti kapitalisme yang berhaluan kiri berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang mengusung garis politik ekstrim terhadap pemerintah yang kala itu sedikit banyak mempengaruhi jalannya stabilitas politik di Indonesia.

Dalam mencari dan juga mendapatkan data yang akurat terkait pembahasan mengenai relevansi pemikiran sosialis Sutan Syahrir terkait studi kasus yang diteliti perjuangan anti kapitalis di Indonesia, peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif atau dapat dikatakan penelitian secara analisis. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 60) ia memahami jenis penelitian kualitatif adalah menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Peneliti memanfaatkan jenis penelitian studi kasus dan dokumen sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pengumpulan data melalui analisis studi kasus dapat menjadi tolak ukur melalui fenomena yang terjadi secara nyata dengan melakukan observasi secara mendalam, selain itu peneliti melakukan studi dokumen untuk mencapai informasi dalam pembahasan dan hasil yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian literatur keperpustakaan juga digunakan dalam memahami dan menjelaskan isu terkait analisis pemikiran Sutan Syahrir terhadap perjuangan kapitalisme di Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran sosialisme Sutan Syahrir terhadap perjuangan anti-kapitalisme di Indonesia dengan merelevansikannya menggunakan studi kasus masyarakat lokal Papua memperjuangkan anti-kapitalisme yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia di wilayah Papua. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kontribusi Sutan Syahrir dalam pemikiran sosialisme.

Fokus penelitian ini terkait bagaimana kapitalisme yang diakibatkan oleh PT. Freeport Indonesia di wilayah Papua dalam mempengaruhi masyarakat lokal, lingkungan, dan kesejahteraan lokal dan juga bagaimana cara penanggulangan yang efektif yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengurangi ataupun menghilangkan praktik kapitalisme yang dilakukan PT. Freeport. Sehingga dengan adanya fokus pada penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis secara menyeluruh apa saja yang menjadi batas permasalahan dalam penelitian ini.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Freeport merupakan perusahaan asing dari Amerika Serikat yang bergerak pada bidang pertambangan tembaga dan emas. Sejak menerima izin dari Presiden ke-2 Indonesia, yakni Bapak Soeharto pada tahun 1967, perusahaan PT. Freeport *Sulphur of Delaware* mulai melakukan penambangan di wilayah Papua. Kehadiran PT. Freeport di wilayah Papua tidak disambut baik oleh warga lokal. Masyarakat merasa bahwa kehadiran PT. Freeport Indonesia hanya memberikan keuntungan bagi pihak asing dan sangat merugikan warga lokal karena banyak munculnya pencemaran lingkungan hingga kerusakan pada tanah yang diakibatkan oleh operasional PT. Freeport Indonesia.

Berdasarkan pemikiran sosialisme Syahrir yang menginginkan distribusi kekayaan yang lebih adil dan pemerataan manfaat dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat lokal, yang tentunya sangat bertentangan dengan apa yang sudah terjadi pada kasus PT. Freeport. Distribusi kekayaan yang tidak adil dan pemerataan manfaat sumber daya alam sama sekali tidak dicerminkan oleh PT. Freeport yang selama ini dikuasai asing. Amerika Serikat selaku pemilik PT. Freeport yang juga menganut ideologi kapitalisme tentunya mengoperasionalkan perusahaannya dengan pemikiran keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah Indonesia yang saat itu tidak memiliki cukup kuasa untuk mengatur jalannya operasional PT. Freeport meskipun perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya di bumi Indonesia. seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai merasakan kerugian yang tidak senilai dengan keuntungan yang didapat. Kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh warga lokal yang terkena dampak pencemaran lingkungan tetapi juga sumber daya alam Indonesia yang menjadi aset masa depan bangsa mendorong pemerintah untuk memiliki kontrol dominan atas hadirnya PT. Freeport di Papua, Indonesia.

Pada akhir tahun 2018, PT. Freeport Indonesia diambil alih oleh pemerintah yang kini memiliki saham sekitar 51%. Diharapkan dengan kepemilikan dominan, Freeport dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah sejalan dengan pandangan Syahrir yang selalu mengedepankan pembangunan ekonomi berpihak pada kepentingan rakyat daripada kepentingan kapitalis. Kepentingan yang dimaksud pemikiran sosialis tidak hanya melihat seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan tetapi juga melihat bagaimana pendistribusian kekayaan yang baik dan memperhatikan dengan serius dampak yang disebabkan oleh operasional seperti kerusakan tanah dan pencemaran lingkungan lainnya.

Kapitalisme yang digambarkan melalui PT. Freeport juga dianggap sangat eksploitatif. Berdasarkan nilai sosialis Syahrir, Selama ini PT. Freeport telah melakukan operasional yang lebih mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemikiran sosialisme Sutan Syahrir menekankan perlawanan terhadap ketimpangan yang lebih menguntungkan bagi pihak yang berkuasa daripada pihak masyarakat lokal. Dalam kasus ini, Freeport mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar selama bertahun-tahun dibandingkan dengan warga lokal yang mendapatkan kerugian lebih banyak.

Eksplotasi tambang yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia di tanah Papua juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat adat Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro.

1. Eksplotasi tambang yang dilakukan secara terus-menerus mengakibatkan hilangnya tanah adat milik warga, dimana terjadi praktik eksploitasi pada sektor tambang ini kerap menggusur lahan dan mengurangi wilayah tempat tinggal masyarakat Papua, sehingga banyak terjadi pengurangan tanah adat. Tanah adat yang diambil, dinilai sama sekali tidak ada terjadi negosiasi antara Freeport dan pemerintah dengan masyarakat adat. Tanah yang telah dimiliki secara turun-temurun oleh masyarakat adat, dirampas secara sepihak hanya demi kepentingan segelintir orang dan tidak adanya kompensasi yang senilai diberikan oleh Freeport kepada masyarakat adat.
2. Kerusakan lingkungan menjadi faktor yang paling memungkinkan dari praktik eksploitasi tambang yang terjadi. Limbah tambang atau alat yang digunakan kerap merusak lingkungan sekitar, sehingga jika tidak dilakukannya praktik penambangan

yang tidak berkelanjutan akan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, deforestasi atau penggundulan hutan atau lingkungan, terjadinya erosi pada tanah dan degradasi lingkungan atau dapat dikatakan penurunan dari kualitas lingkungan tersebut.

3. Pencemaran menjadi salah satu faktor terbesar akibat praktik pertambangan yang dilakukan sejumlah perusahaan, dimana limbah cair maupun padat yang dikeluarkan hasil pertambangan kerap tidak dibuang dan dibersihkan dengan semestinya. Alhasil limbah sisa aktivitas PT. Freeport menyebabkan pendangkalan di muara-muara sungai baik di dalam area operasional freeport hingga area luar. Limbah yang terus menumpuk inilah yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada alam sekitar, sehingga dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab yang besar oleh perusahaan tambang dalam menanggulangi masalah limbah ini.
4. Dampak pada sosial dan ekonomi masyarakat yang merusak mata pencaharian lokal, karena hal ini masyarakat banyak mengalami kesulitan dalam akses pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Alam sekitar yang menjadi sumber kehidupan dan ekonomi banyak yang terdampak akibat praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendasar supaya para perusahaan tambang dapat mengurangi kerugian pada aspek sosial dan ekonomi warga sekitar.

Sehingga dengan adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah, seperti limbah tailing yang berasal dari sisa proses pengolahan hasil tambang PT. Freeport Indonesia. Limbah ini telah menyebar luas hingga menimbulkan pengendapan yang berakibat kerusakan pada sungai-sungai di kawasan Mimika, Papua. Selain itu, limbah ini membuat perahu milik para nelayan sulit untuk bergerak hingga mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan hidup, seperti krisis sumber air bersih. Dalam catatan Lepemawi, hampir 6.000 masyarakat terkena limbah ini, hingga mengakibatkan ribuan ikan mati, pendangkalan muara, serta matinya pepohonan di tepi sungai pada kawasan yang dilewati oleh limbah tailing.

Adolfina Kuum sebagai koordinator umum Komunitas Peduli Lingkungan Hidup (Lepemawi) Timika, yang juga hadir di DPR, menjelaskan bahwa para ibu di daerah tersebut dapat menghabiskan hingga lima jam dalam sehari untuk mencari sumber air bersih guna mendukung aktivitas rumah tangga mereka. Adolfina menambahkan bahwa anak-anak juga mengalami gatal-gatal akibat dari penggunaan air yang sudah tercemar limbah. Sementara orang tua mereka tidak mampu membawa mereka ke rumah sakit karena sungai yang dipenuhi limbah tailing, membuat perjalanan yang panjang dan mahal. Adolfina menjelaskan bahwa perjalanan dari pelabuhan ke kota Otakwa atau Omoga dan daerah sekitarnya sekarang membutuhkan 90 liter BBM, bukan 40 liter seperti sebelumnya. Mereka harus menempuh waktu tiga hingga empat jam di lautan.

Segala bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat lokal merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Indonesia sekaligus PT. Freeport telah mengakibatkan timbulnya kerusakan pada akses dan mata pencaharian milik warga lokal yang dijaga generasi ke generasi sedari Freeport melaksanakan operasional tambang. Ironisnya, pelanggaran dan kerusakan lingkungan dan kemanusiaan masih diabaikan sampai saat ini. Pemerintah Indonesia yang seharusnya menjadi garda paling depan dalam melindungi kepentingan warganya justru menjadi bagian dari pelaku itu sendiri. PT. Freeport di sisi lain terlihat tidak memiliki keinginan untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi. Bahkan PT. Freeport tidak segan untuk melancarkan aksi licik dan tindakan manipulasi setiap munculnya bentuk pembahasan aspirasi masyarakat lokal. Pemerintah yang menjadi bagian dari kerusakan ini justru tampak abai dan mendukung PT. Freeport dalam melancarkan operasionalnya. Pemerintah hanya peduli tentang saham dan keuntungan untuk memastikan pendapatan negara tetap mengalir. Berbagai pihak berpendapat bahwa berdasarkan temuan tindak kejahatan lingkungan dan kemanusiaan di atas, akuisisi saham

sebesar 51% tidak meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengelola Freeport dengan cara yang sesuai dan berkeadilan.

Beberapa masyarakat adat di 23 kampung, di 3 distrik yaitu Amimuga, Jita, dan Manasari, telah melakukan pelaporan kondisi yang mereka alami kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua, hingga ke Presiden. Perwakilan masyarakat yang telah melapor ke DPR mendapatkan respons berupa perjanjian akan sesegera mungkin memanggil pihak dari PT. Freeport Indonesia untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait pelaporan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Sebelum melaporkan ke pemerintah, masyarakat lebih dulu melakukan tuntutan mereka secara langsung ke PT. Freeport yang berada di wilayah mereka.

Namun, segala bentuk pelaporan yang telah diajukan kepada pemerintah terhadap PT. Freeport, tetap saja tidak memberikan respon yang signifikan dan tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat lokal. Freeport pernah menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab mereka atas pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungan di wilayah konsesi mereka di kantor Yayasan Lingkungan Hidup (YALI) Papua. Seorang spesialis PT. Freeport menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas masalah tersebut, bukan mereka. Freeport dan YALI Papua melakukan pertemuan ini sebagai tanggapan atas studi yang diterbitkan oleh YALI Papua yang menemukan bahwa logam berat berbahaya terdapat dalam makanan masyarakat Kamoro yang terdampak limbah tailing.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Papua dan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat atau Foker LSM Papua, sebagai perwakilan dari masyarakat lokal, telah melakukan tuntutan secara langsung kepada Pemerintah dan PT. Freeport untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di tanah ulayat suku Amungme dan Kamoro. Sebelum kontrak baru ditandatangani, pemerintah Indonesia dan PT. Freeport harus menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat adat dari kedua suku tersebut. Kabupaten Mimika, Papua, adalah lokasi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Jika pemerintah Indonesia ingin mengganti mitra PT. Freeport Mining dengan perusahaan lain, mereka harus menyelesaikan perselisihan antara suku Amungme dan Kamoro di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pemerintah Indonesia harus mengamandemen kontrak karya (KK) dan IUPK untuk menjamin kehidupan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Selain itu, akibat penghentian sementara operasi penambangan, pemerintah harus tegas mencari cara untuk mengatasi pengangguran.

Oleh karena itu, dibutuhkan cara efektif yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal, LSM, maupun pemerintah setempat dalam menanggulangi kerugian akibat praktik pertambangan ini.

1. Adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia, dimana masyarakat harus memastikan bahwa hak masyarakat lokal terpenuhi seperti hak tanah adat dan hak lingkungan adat yang perlu dipatuhi secara ketat. Sehingga, diharapkan dapat mengurangi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan kepada pihak masyarakat lokal.
2. Dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam segala bentuk proses perencanaan maupun implementasi dari pelaksanaan pertambangan ini, dibutuhkannya transparansi dari pihak perusahaan pertambangan kepada masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal dapat mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi akibat pertambangan dan mengetahui dampak apa yang akan mereka rasakan.
3. Adanya kompensasi dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak, dimana pihak perusahaan tambang atau dalam konteks penelitian ini Freeport wajib memberikan kompensasi yang adil dan merata kepada pihak masyarakat lokal yang terdampak kerugian akibat pertambangan yang dilakukan, diperlukannya perjanjian sejak awal proses perencanaan sehingga dalam implementasinya dapat sesuai prosedur dan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

4. Adanya pemantauan proyek dan lingkungan yang dilakukan, masyarakat lokal perlu menerapkan pemantauan yang ketat kepada pihak perusahaan tambang atau PT. Freeport dalam mengawasi dampak lingkungan yang akan terjadi kedepannya, dimana masyarakat lokal dapat memantau kualitas dari lingkungan mereka seperti kualitas air, udara maupun aspek lingkungan lainnya.
5. Melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, dimana dengan adanya dukungan pemberdayaan ekonomi lokal ini oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan baik secara berkelanjutan nantinya. Sehingga masyarakat dapat mendapatkan akses yang lebih adil dalam memperbaiki perekonomiannya.
6. Adanya reklamasi tambang dan pemulihan lingkungan, dengan melakukan cara ini penting dalam membenahi dan memulihkan tanah bekas tambang dan mengurangi dampak negatif lainnya yang dapat timbul, dimana bentuk reklamasi yang dilakukan dapat berbentuk rehabilitasi lingkungan dan habitat hewan, kemudian peningkatan pada kualitas air. Sehingga pemulihan lingkungan yang dilakukan ini dapat memperbaiki struktur lingkungan yang terdampak dan dapat mengembalikan ekosistem yang lebih baik.

Dengan begitu dibutuhkannya kerjasama yang baik antara pihak PT. Freeport, masyarakat lokal, dan pemerintah dalam memastikan bahwa praktik pertambangan yang dilakukan tidak terdapat unsur kapitalisme pada pihak tertentu. Sehingga dibutuhkan praktik terbaik dalam meminimalisir kerugian yang diterima masyarakat lokal dalam aspek ekonomi maupun lingkungan, dibutuhkannya peran tegas pemerintah dalam menindaklanjuti segala bentuk penyimpangan atau segala kegiatan yang bersifat kapitalisme yang dilakukan pihak PT. Freeport kepada masyarakat lokal. Kesuksesan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab di Papua sangat bergantung pada kerja sama yang efektif antara ketiga pihak ini. Kerja sama ini penting untuk melibatkan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama yang bukan hanya sebagai objek pembangunan yang menguntungkan segelintir pihak. Pemerintah harus memperhatikan bahwa mekanisme untuk konsultasi dan persetujuan dengan masyarakat adat haruslah kuat dan tidak tergesa-gesa, hal ini juga termasuk dengan mekanisme perlindungan hak-hak mereka. Seluruh aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat oleh patut untuk diwadahi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dan PT. Freeport. Di sisi lain, Freeport harus menunjukkan komitmen dengan menerapkan praktik terbaik yang meminimalisir berbagai bentuk kerusakan dalam operasional industri pertambangan. Hal ini berarti memenuhi standar sosial dan lingkungan yang tinggi, mengurangi efek buruk, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan transparan guna menciptakan keadilan terhadap masyarakat lokal yang selama ini merasa dirugikan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial dalam mengatur, memfasilitasi, dan mengawasi kerjasama ketiga pihak. Pemerintah diharapkan lebih tegas dan objektif untuk menegakkan peraturan dan menindak segala bentuk penyimpangan atau praktik kapitalis yang merugikan masyarakat lokal. Komitmen semua pihak dalam mengedepankan dan memfokuskan kepentingan bersama dalam segala bentuk aktivitas PT. Freeport menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan tidak adanya unsur kapitalisme yang merugikan masyarakat lokal selama ini.

III. KESIMPULAN

Pemikiran sosialisme Sutan Syahrir memiliki relevansi yang signifikan terhadap perjuangan anti-kapitalisme di Indonesia, seperti yang terlihat dari studi kasus konflik dengan PT. Freeport Indonesia di Papua. Syahrir menekankan pentingnya distribusi keadilan ekonomi dan perlindungan lingkungan, nilai-nilai yang bertentangan dengan praktik eksploitasi kapitalis yang seringkali merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. PT. Freeport Indonesia di Papua adalah

contoh konkret bagaimana praktik kapitalisme yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan yang serius. Sutan Syahrir, dengan pandangannya yang sosialis, akan menentang keras praktik seperti ini yang mengarah pada eksploitasi dan ketidaksetaraan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ideologi sosialisme Syahrir tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi yang nyata untuk tantangan sosial dan ekonomi masa kini. Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif kapitalisme yang berlebihan, seperti yang terlihat dalam kasus PT. Freeport, harus didukung dengan kebijakan publik yang lebih inklusif dan bertanggung jawab secara sosial. Secara keseluruhan, pandangan Sutan Syahrir tentang sosialisme tidak hanya sebagai teori politik, tetapi juga sebagai landasan moral untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, V., & Indriawati, T. (2022, September 8). Apa Itu Ideologi? Halaman all. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/08/080000979/apa-itu-ideologi-?page=all>
- Basit, M. A. (2004). *SOSIALISME KERAKYATAN (STUDI ATAS PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR MENGENAI SOSIALISME DI INDONESIA 1909-1966)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)
- Fandy. (n.d.). *Pengertian Sosialisme: Ciri-Ciri, dan Perkembangannya*. Gramedia. Retrieved June 30, 2024, from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisme/>
- Jatam. (2023, Februari 5). *Abai Kerusakan Lingkungan, Freeport dan Negara Hanya Peduli Cuan - Informatif & Edukatif*. Galeri Papua. Retrieved June 30, 2024, from <https://galeripapua.com/abai-kerusakan-lingkungan-freeport-dan-negara-hanya-pedulicuan/>
- Journalism, C. (2024, Maret 6). *Sosialisme Kerakyatan Sutan Sjahrir, Menjunjung Kemanusiaan*. <https://serayunews.com/sosialisme-kerakyatan-sutan-sjahrir-menjunjung-kemanusiaan>
- Keperihatinan Kelompok Masyarakat Sipil Terhadap Konflik PT. Freeport dan pemerintah Indonesia*. (2017, Februari 23). Retrieved June 30, 2024, from <https://www.walhi.or.id/keperihatinan-kelompok-masyarakat-sipil-terhadap-konflik-pt-freeport-dan-pemerintah-indonesia>
- PENGERTIAN IDEOLOGI MENURUT PARA AHLI*. (n.d.). E-JURNAL. Retrieved June 30, 2024, from <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-ideologi-menurut-para-ahli.html>
- Rahmah, A. (2022, Mei 17). Sejarah Paham Sosialisme: Latar Belakang, Tokoh, dan Ciri-cirinya. *detikcom*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6081728/sejarah-paham-sosialisme-latar-belakang-tokoh-dan-ciri-cirinya>
- Setiawan, H., & Sumarno. (2020, April 20). SUTAN SJAHRIR, SOSIALISME, DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1927-1962. 9(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/32806>
- Sucahyo, N. (2023, February 1). Limbah Tailing Freeport Rusak Lingkungan, Hancurkan Kehidupan. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/limbah-tailing-freeport-rusak-lingkungan-hancurkan-kehidupan/6943257.html>
- Susanti, A. D.S. D., Zuhri, K. M., & Ghifari, I. U. (2017, Agustus 29). Pemikiran Politik Sosialisme Demokrat Sutan Syahrir. Retrieved Juni 30, 2024, from <https://kumpulanstudi-aspirasi.com/pemikiran-politik-sosialisme-demokrat-sutan-syahrir/>
- Syakra, C. J. (2012). Pemikiran Politik Soetan Sjahrir. *Jurnal Dinamika Politik*, 1(2).
- Tysara, L. (2023, Mei 30). Jenis Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli, Pahami Karakteristiknya. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5299910/jenis->

penelitian-kualitatif-menurut-para-ahli-pahami-karakteristiknya?page=3

Yahya, R. A. (2022, Oktober 11). Ideologi Sosialisme: Tujuan, Tokoh, Ciri, dan Latar Belakang. *Tirto.id*. <https://tirto.id/ideologi-sosialisme-tujuan-tokoh-ciri-dan-latar-belakang-glEy>